

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan ekonomi daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pariwisata juga ikut serta mendorong pertumbuhan sektor informal, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Di Kota Padang, pengembangan kawasan wisata, khususnya Pantai Padang, menjadi bagian dari strategi peningkatan daya tarik wisatawan. Dalam konteks ini, pengelolaan pariwisata diarahkan pada penataan ruang publik agar lebih tertib, bersih, dan menarik bagi pengunjung. Pemerintah pun menerapkan langkah-langkah seperti relokasi PKL ke area khusus yang dianggap lebih terorganisir, demi menjaga estetika dan kenyamanan kawasan wisata.

Pemerintah Kota Padang dihadapkan pada dilema antara menjaga estetika dan keteraturan ruang publik dengan menjamin akses ekonomi bagi warga yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas informal. Dalam praktiknya, kebijakan penataan berfokus pada aspek visual dan tata ruang kawasan wisata. Pemerintah telah berupaya melalui relokasi dan penyediaan fasilitas, namun masih terdapat celah pada pengimplementasiannya.

Implementasi kebijakan menimbulkan berbagai persoalan di tingkat akar rumput. Penelitian ini menemukan bahwa relokasi PKL dari kawasan utama Pantai Padang ke Lapau Panjang Cimpago menyebabkan penurunan drastis terhadap pendapatan para pedagang, berkurangnya pelanggan tetap, serta berkurangnya aksesibilitas terhadap ruang usaha yang strategis. Selain aspek ekonomi, terdapat pula dampak sosial dan budaya, di mana banyak PKL mengalami kehilangan ruang

interaksi yang telah terbangun dengan masyarakat dan wisatawan. Fasilitas yang tidak memadai di lokasi relokasi turut memperparah kondisi tersebut dan menjadi sumber ketidakpuasan bagi para PKL.

Dari sudut pandang PKL, kebijakan penataan sering kali dipersepsikan sebagai bentuk penggusuran yang mengabaikan hak atas ruang hidup dan penghidupan, dalam kondisi demikian PKL menunjukkan bentuk resistensi terhadap kebijakan tersebut. Resistensi ini muncul dalam bentuk penolakan terbuka, kepatuhan semu, hingga strategi adaptasi agar tetap bisa berdagang di lokasi lama. Ketidakterlibatan PKL dalam proses perumusan kebijakan membuat mereka merasa kebijakan ini bersifat sepihak dan tidak berpihak pada masyarakat kecil. Temuan ini memperkuat pandangan dalam *anthropology of policy* bahwa kebijakan selain sebagai instrumen teknokratis, juga sebagai arena pertarungan makna dan kepentingan antara aktor negara dengan masyarakat yang diatur.

Kebijakan penataan PKL dalam pengelolaan pariwisata di kawasan Pantai Padang seharusnya tidak hanya berorientasi pada estetika dan keteraturan ruang, melainkan juga mempertimbangkan eksistensi ekonomi lokal dan aspek sosial budaya yang melekat dalam aktivitas PKL. Proses penyusunan dan implementasi kebijakan perlu dilakukan dengan melibatkan pihak terkait melalui ruang dialog antara pemerintah dan PKL agar tercipta solusi yang mengakomodasi kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan belum dapat dikatakan sempurna, oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kebijakan pengelolaan pariwisata, khususnya dalam hal penataan PKL di kawasan Pantai Padang, sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek penertiban dan estetika kawasan, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah perlu menegaskan kembali regulasi yang telah ditetapkan terkait penataan PKL, agar implementasinya berjalan konsisten dan tidak menimbulkan ambiguitas di lapangan. Penegasan ini juga harus dibersamai dengan pendekatan yang komunikatif dan humanis, selain itu revitalisasi lokasi relokasi dan kawasan wisata juga perlu dilakukan agar dapat menjadi ruang usaha yang layak serta menarik baik bagi pedagang maupun wisatawan.
2. Bagi mahasiswa Antropologi maupun jurusan lainnya, penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk menggali lebih dalam terkait hubungan antara kebijakan publik, ruang kota, dan masyarakat sektor informal. Masih banyak aspek lain yang dapat diteliti, seperti studi komparatif antar daerah, analisis gender dalam ruang kerja informal, atau kajian lebih dalam tentang strategi resistensi PKL sebagai bentuk negosiasi kekuasaan.